

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, pemrosesan, dan penyajian data, transaksi, dan peristiwa yang berhubungan dengan keuangan sehingga orang yang menggunakannya dapat dengan mudah menggunakannya untuk memahami pengambilan keputusan dan tujuan lainnya.

Akuntansi menurut Sumarsan (2017:1) adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan atau suatu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut R. Mac Iver (Syafiie, 2003:135), pemerintah itu adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan, bagaimana manusia itu bisa diperintah. Dengan demikian pemerintah dapat ditinjau dari sejumlah aspek penting seperti kegiatan struktur fungsional, maupun tugas kewenangan.

Menurut Halim (2002) Akuntansi Pemerintahan merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintahan yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah yang memerlukan.

Dalam akuntansi pemerintahan, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi tentang transaksi ekonomi dan keuangan yang melibatkan organisasi pemerintah dan organisasi nirlaba lainnya. Dalam pelaksanaan akuntansi pemerintahan, perlu adanya undang-undang sebagai dasar pelaksanaannya. Dasar hukum yang digunakan adalah ukuran legalitas formal dari kegiatan akuntansi yang berhubungan dengan suatu organisasi, perusahaan atau akuntan. Adapun dasar hukum akuntansi pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan & Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, PP No. 71 Tahun 2010, ada beberapa jenis laporan keuangan pemerintah, yaitu laporan realisasi anggaran berbasis kas, laporan arus kas, laporan keuangan konsolidasian, laporan operasional, dan catatan atas laporan keuangan.

Salah satu laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, yaitu laporan realisasi anggaran, adalah laporan yang merangkum sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah. Laporan tersebut menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya selama satu periode pelaporan. Unsur-unsur yang langsung tercakup dalam laporan realisasi anggaran antara lain LRA pendapatan, belanja,

transfer dan pembiayaan. PP No 71 Tahun 2010 mengharuskan laporan keuangan mengadopsi sistem akrual.

Di masa pandemi COVID-19(*Corona Virus Disease 2019*), pertama kali muncul pada akhir tahun 2019, serta muncul di Indonesia pada awal tahun 2020 menyebabkan imbas yang cukup besar, baik bagi Indonesia sendiri maupun seluruh dunia di berbagai sektor. Perekonomian di berbagai negara mengalami banyak hambatan ketika masa awal-awal pandemi ini. Berbagai sektor perekonomian baik daerah maupun pusat lumpuh total sehingga menyebabkan menurunnya pendapatan. Pandemi ini terjadi dari akhir 2019 dan tetap terjadi setelah tahun 2020 selesai. Untuk itu, penulis tertarik untuk melakukan tinjauan atas Laporan Realisasi Anggaran sebelum dan saat pandemi COVID-19 ini pada pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri periode tahun anggaran 2019-2020.

Penulis memilih Pemerintahan Kabupaten Wonogiri sebagai objek dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini karena Kabupaten Wonogiri pernah dinobatkan sebagai kabupaten terinovatif pada tahun 2020 oleh Kemendagri RI pada ajang *Innovative Government Award 2020*. Melalui hal itu besar kemungkinan bahwa kebijakan dan pembangunan di Kabupaten Wonogiri sedang berkembang ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu penulis ingin meninjau bagaimana Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam menyusun laporan keuangan yang terkhusus lagi Laporan Realisasi Anggaran, apakah laporan tersebut sudah sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku serta bagaimana perbandingan penyajian dan pengungkapannya sebelum dan saat pandemi COVID-19 ini, penulis akan menuangkan tinjauan-tinjauan tersebut ke dalam Karya Tulis Tugas

Akhir yang berjudul, “TINJAUAN ATAS PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19 PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI”.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana kesesuaian atas klasifikasi dari komponen Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku.
- 2) Bagaimana kesesuaian atas penyajian dan pengungkapan dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku.
- 3) Apakah ada perbedaan penyajian dan pengungkapan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Wonogiri sebelum dan saat terjadinya pandemi COVID-19.
- 4) Apa saja dampak dari terjadinya pandemi COVID-19 terhadap Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

1.3 Tujuan Penulisan

- 1) Mengetahui kesesuaian atas klasifikasi dari komponen Laporan Realisasi Anggaran oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku.
- 2) Mengetahui kesesuaian atas penyajian dan pengungkapan dari Laporan Realisasi Anggaran oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku.

- 3) Mengetahui perbedaan penyajian dan pengungkapan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Wonogiri sebelum dan saat terjadinya pandemi COVID-19.
- 4) Mengetahui dampak dari terjadinya pandemi COVID-19 terhadap Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis akan fokus pada pembahasan tentang penyajian dan publikasi Laporan Realisasi Anggaran tahun 2019 dan 2020 Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Pembahasan hanya difokuskan pada relevansi penyajian Laporan Realisasi Anggaran dan Pengungkapannya di Catatan atas Laporan keuangan LRA dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku serta dengan sedikit membandingkan penyajian dan pengungkapan Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2019 dengan tahun anggaran 2020 yakni masa sebelum pandemi dan saat pandemi. Untuk membandingkan tersebut penulis akan melakukan analisis perbandingan tiap-tiap komponen Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Wonogiri tahun anggaran 2019-2020.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulis berharap penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini bisa memberikan kontribusi baik untuk mahasiswa PKN STAN maupun masyarakat umum terhadap pengembangan ilmu pengetahuan terkhususnya pada praktik penyajian dan pengungkapan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Wonogiri serta bagaimana dampak COVID-19 terhadap Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup gambaran umum makalah yang disusun oleh penulis. Gambaran-gambaran tersebut berupa latar belakang, tujuan penulisan, pembatasan masalah, metode penelitian, serta sistematika pembahasan dalam penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini mencakup landasan teori yang digunakan untuk penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir, landasan teori ini berupa pengertian dari Laporan Realisasi Anggaran dan klasifikasi komponen Laporan Realisasi Anggaran beserta definisinya.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini mencakup metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir. Adapun metode yang digunakan penulis tersebut adalah metode literatur. Metode ini penulis lakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dengan mempelajari buku literatur, undang-undang dan peraturan yang berlaku, website, dan lain sebagainya sehingga dapat digunakan penulis untuk menunjang penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, pemaparan gambaran umum tentang Kabupaten Wonogiri sebagai objek penelitian dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini. Gambaran umum ini berisi tentang Sejarah Singkat Kabupaten Wonogiri, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri, visi dan misi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri dan tugas pokok dan fungsinya Serta penyajian dan pengungkapan Laporan Realisasi Anggaran. Pada bab ini juga dilakukan pembahasan mengenai tinjauan atas

klasifikasi komponen Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun Anggaran 2019 dan 2020.

BAB IV PENUTUP

Bab ini mencakup simpulan atas bab-bab yang telah diuraikan sebelumnya atas penyajian dan pengungkapan Laporan Realisasi Anggaran oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri